



# **LAPORAN KEUANGAN**

## **PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Seokarno Hata No. 214 Payakumbuh**

**Telp. 0752-92603 Fax. 0752-7970992**

**Payakumbuh - Sumatera Barat 26226**

***e-mail : pa.payakumbuh@pta-padang.go.id***

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

**Pengadilan Agama Payakumbuh** adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Pengadilan Agama Payakumbuh** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 /PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Payakumbuh, 12 Juli 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



NURMIA LOCANA, S. KOM  
NIP. 19861113 200904 2 006

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran .....	v
Pernyataan Tanggung Jawab .....	vii
Ringkasan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	6
II. Neraca .....	8
III. Laporan Operasional.....	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	13
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	15
A.    Penjelasan Umum .....	15
A.1.    Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Payakumbuh .....	15
A.2.    Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	16
A.3.    Basis Akuntansi .....	16
A.4.    Dasar Pengukuran.....	17
A.5.    Kebijakan Akuntansi.....	17
B.    Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	26
B.1.    Pendapatan .....	26
B.2.    Belanja.....	27
B.2.1.    Belanja Pegawai .....	29
B.2.2.    BelanjaBarang .....	30
B.2.3.    Belanja Modal .....	31
B.2.3.1.    Belanja Modal Peralatan dan Mesin .....	31
C.    Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	33
C.1.    Aset Lancar.....	33
C.1.1.    Kas di Bendahara Pengeluaran .....	33
C.1.2.    Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) .....	34

C.1.3.	Persediaan.....	34
C.1.4.	Persediaan Yang Belum Diregister .....	35
C.2.	Aset Tetap .....	35
C.2.1.	Tanah.....	36
C.2.2.	Peralatan dan Mesin .....	36
C.2.3.	Gedung dan Bangunan.....	37
C.2.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	37
C.2.5.	Aset Tetap Lainnya .....	38
C.2.6.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	38
C.3.1.	Aset Tak berwujud .....	39
C.3.2.	Aset Lain-lain .....	40
C.3.3.	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya .....	41
C.4.	Kewajiban Jangka Pendek .....	41
C.4.1.	Utang Kepada Pihak Ketiga .....	41
C.4.2.	Uang Muka dari KPPN .....	42
C.5.	Ekuitas .....	42
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	44
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	44
D.2.	Beban Pegawai .....	44
D.3.	Beban Persediaan .....	45
D.4.	Beban Barang dan Jasa .....	45
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	46
D.6.	Beban Perjalanan Dinas .....	47
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	47
D.8.	Kegiatan Non Operasional .....	48
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	49
E.1.	Ekuitas Awal .....	49
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	49
E.3.	Transaksi Antar Entitas.....	49
E.4.1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) .....	50
E.4.	Ekuitas Akhir.....	50

F.	Pengungkapan Penting Lainnya .....	51
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	51
F.2.	Pengungkapan Lain-lain .....	51
F.2.1.	Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK .....	51
F.2.2.	Rekening Pemerintah.....	51
F.2.3.	Revisi DIPA .....	51
F.2.4.	Ralat SPM, SSBP, dan SSPB.....	51
F.2.5.	Catatan Penting Lainnya .....	52

## *DAFTAR TABEL*



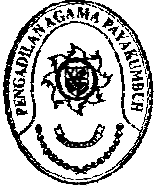
# Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020 .....	2
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 .....	2
Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud .....	22
Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang .....	24
Tabel 5 Tabel Masa Manfaat.....	25
Tabel 6 Revisi Anggaran .....	26
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPNP per 30 Juni 2021.....	26
Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBPNP per 30 Juni 2021 dan 2020 .....	27
Grafik 9 Perkembangan PNBPNP Tahun 2020 dan 2021.....	27
Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2021 .....	28
Grafik 11 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2021.....	28
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2021 dan 2020 .....	29
Tabel 13 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2021 dan TA 2020 .....	29
Tabel 14 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2021 dan 2020 .....	30
Tabel 15 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2021 dan 2020.....	31
Tabel 16 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2021 dan 2020 .....	32
Tabel 17 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 .....	33
Tabel 18 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran .....	34
Tabel 19 Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 .....	34
Tabel 20 Rincian Aset Tetap .....	35
Tabel 21 Rincian Saldo Tanah .....	36
Tabel 22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....	39
Tabel 23 Rincian Aset Lainnya per 30 Juni 2021 .....	39
Tabel 24 Rincian Aset tak Berwujud .....	40
Tabel 25 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya .....	41
Tabel 26 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.....	41
Tabel 27 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga.....	42
Tabel 28 Rincian PNBPNP 30 Juni TA 2021 dan 2020.....	44
Tabel 29 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2021 dan 2020.....	44
Tabel 30 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2021 dan 2020 .....	45
Tabel 31 Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2021 dan 2020.....	46
Tabel 32 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2021 dan 2020 .....	46
Tabel 33 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2021 dan TA 2020 .....	47
Tabel 34 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2021 dan 2020 .....	47
Tabel 35 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2021 dan 2020 .....	48
Tabel 36 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2021 .....	50

Lampiran :

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/ Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*



## PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS I B

Jln. Soekarno - Hatta No. 214 Telp. (0752) 92603& Fax (0752) 7970992

Website: [www.pa-payakumbuh.go.id](http://www.pa-payakumbuh.go.id) Email : papayakumbuh@yahoo.co.id

PAYAKUMBUH 26226

---

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan **Pengadilan Agama Payakumbuh** yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan **Pengadilan Agama Payakumbuh** telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Payakumbuh, 12 Juli 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



NURMIA LOCANA, S. KOM  
NIP.19861113 200904 2 006

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan **Pengadilan Agama Payakumbuh** Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2021 adalah sebesar Rp 2.877.130.025,- atau mencapai 46,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 6.191.809.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni TA 2021 dan 2020  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran	TA 2021		TA 2020
		Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	3.965.678	63,21	3.013.560
Belanja Negara	15.224.788.000	6.796.766.486	44,64	6.116.585.461

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 15.909.508.692, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 32.411.000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 15.877.097.692; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp7.485.000,-

Nilai Kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- dan Rp 15.879.508.692,-

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2021	2020	Rp	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	32.411.000	0	30.000.000	0,00
Aset Tetap	15.877.097.692	973.000	(1.438.000)	(147,79)
Aset Lainnya	0	0	(0)	(0,00)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>15.909.508.692</b>	<b>16.062.281.576</b>	<b>(152.772.884)</b>	<b>(0,95)</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	30.000.000	35.924.796	(5.924.796)	(16,49)
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>30.000.000</b>	<b>35.924.796</b>	<b>(5.924.796)</b>	<b>(16,49)</b>
<b>Ekuitas</b>				
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>15.879.508.692</b>	<b>16.026.356.780</b>	<b>(146.848.088)</b>	<b>(0,92)</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>15.909.508.692</b>	<b>16.062.281.576</b>	<b>(152.772.884)</b>	<b>(0,92)</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 3.023.978.113 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(3.023.978.113). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(defisit) sebesar Rp0 dan surplus(defisit) sebesar Rp 0,00 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp(3.023.978.113)

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp 16.026.356.780 dikurangi defisit-LO sebesar Rp(3.023.978.113), ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 2.877.130.025 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp 15.879.508.692.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.



# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2021			TA 2020
			Anggaran	Realisasi	% thd Angg	Realisasi
<b>A. Pendapatan</b>						
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	0	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Belanja</b>						
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	5.257.308.000	2.379.833.635	45	2.316.905.583
2.	Belanja Barang	B.2.2.	897.001.000	459.796.390	51	407.739.060
3.	Belanja Modal	B.2.3.	37.500.000	37.500.000	100	0
<b>Jumlah Belanja</b>			<b>6.191.809.000</b>	<b>2.877.130.025</b>	<b>46</b>	<b>2.724.644.643</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian Vyng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**  
**NERACA**  
**PER 30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**  
*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	Catatan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>	<b>C.1</b>		
<b>Kas dan Bank</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	30.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	2.411.000	973.000
Persediaan yang Belum Diregister	C.1. 4.	(0)	0
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>32.411.000</b>	<b>973.000</b>
<b>Aset Tetap</b>	<b>C.2</b>		
Tanah	C.2. 1.	5.984.628.000	5.984.628.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.350.216.641	2.312.716.641
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	10.635.390.900	10.635.390.900
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	15.827.968	15.827.968
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 6.	(3.108.965.817)	(2.887.254.933)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>15.877.097.692</b>	<b>16.062.281.576</b>
<b>Aset Lainnya</b>	<b>C.3</b>		
Aset tak Berwujud	C.3. 1.	0	0
Aset Lain-Lain	C.3. 2.	7.485.000	7.485.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 3.	(7.485.000)	(7.485.000)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>15.909.508.692</b>	<b>16.062.281.576</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>C.4</b>		

Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	0	35.924.796
Uang Muka dari KPPN	C.4. 2.	30.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		30.000.000	35.924.796
Jumlah Kewajiban		30.000.000	35.924.796
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.5	15.879.508.692	15.879.508.692
Jumlah Ekuitas		15.879.508.692	24.359.884.397
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		15.909.508.692	24.377.498.819

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

## III. Laporan Operasional

### PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH LAPORAN OPERASIONAL PER 30 JUNI 2021 DAN 2020 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>			
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	2.365.004.635	2.297.462.458
Beban Persediaan	D. 3	12.672.000	14.686.250
Beban Barang dan Jasa	D. 4	261.333.071	261.333.071
Beban Pemeliharaan	D. 5	129.612.523	67.763.138
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	33.645.000	37.314.700
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 7	221.710.884	227.402.314
<b>Jumlah Beban</b>		<b>3.023.978.113</b>	<b>2.910.272.964</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(3.023.978.113)</b>	<b>(2.910.272.964)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
D. 8			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	(20.000)
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>0</b>	<b>(99.000)</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(3.023.978.113)</b>	<b>(2.910.173.964)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Surplus (Defisit) Laporan Operasional</b>		<b>(3.023.978.113)</b>	<b>(2.910.173.964)</b>

\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*



## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 JUNI 2021 DAN 2020**  
*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Ekuitas Awal	E. 1	16.026.356.780	16.454.017.464
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(3.023.978.113)	(2.910.173.964)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan Mendasar Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	E. 3	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 3. 1.	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3. 2.	0	0
Lain-Lain (Koreksi LO)	E. 3. 3.	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	2.877.130.025	2.724.644.643
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 4	(146.848.088)	(185.529.321)
Ekuitas Akhir	E. 5	15.879.508.692	16.268.488.143

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

# V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis **Pengadilan Agama Payakumbuh**

Tahun 2004 adalah menjadi tonggak baru sejarah peradilan di Indonesia, seluruh badan peradilan dihimpun dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri ini semakin nyata dengan disahkannya beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut memuat beberapa perubahan antara lain semakin bertambahnya kewenangan mengadili bagi Peradilan Agama yaitu mengenai Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.

Untuk itu, **Pengadilan Agama Payakumbuh** telah menetapkan visi yang mengacu kepada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu:

“TERWUJUDNYA **PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH** YANG AGUNG “

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian **Pengadilan Agama Payakumbuh**;
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada **Pengadilan Agama Payakumbuh**;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan **Pengadilan Agama Payakumbuh**;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi **Pengadilan Agama Payakumbuh**;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut **Pengadilan Agama Payakumbuh** menyusun rencana strategis dengan tujuan:

- a. Terlaksananya Peradilan yang profesional, berkualitas, efektif dan efisien serta terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Memantapkan penerapan dan pelaksanaan pola bindalmin sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991;
- c. Terbinanya koordinasi yang efektif antara Aparatur Penegak Hukum dan Institusi Agama diwilayah **Pengadilan Agama Payakumbuh**;
- d. Terciptanya masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum;
- e. Tersusunya laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh;
- f. Terlaksananya Pengawasan terhadap penyelenggaraan Peradilan dilingkungan **Pengadilan Agama Payakumbuh**;

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semesteran TA 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negaraserta laporan manajerial lainnya.

## A.3. Basis Akuntansi

Kantormenerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor **Pengadilan Agama Payakumbuh** adalah sebagai berikut:

##### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(4.) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(5.) Aset**

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### **a. Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum



kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1000.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

### c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang

melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangannomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Softwate computer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasian Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

## (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## (7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## (8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

## (9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.

90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  1. Tanah
  2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, **Pengadilan Agama Payakumbuh** belum mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini tidak adaperubahan rencana penarikan atau rencana penerimaan. Berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 6 Revisi Anggaran

Uraian	2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	5.257.308.000	2.379.833.635
Belanja Barang	897.001.000	459.796.390
Belanja Modal	37.500.000	37.500.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.191.809.000</b>	<b>2.877.130.025</b>

### B.1. Pendapatan

Realisasi  
Pendapatan: Rp  
0

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0. Keseluruhan Pendapatan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2021  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Realisasi Pendapatan TA 2021 tidak mengalami kenaikan sebesar 46,00 persen dibanding realisasi pendapatan TA 2020. Hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Tidak ada sewa rumah dinas

PA Payakumbuh yang berjumlah 0 unit untuk tahun ini.

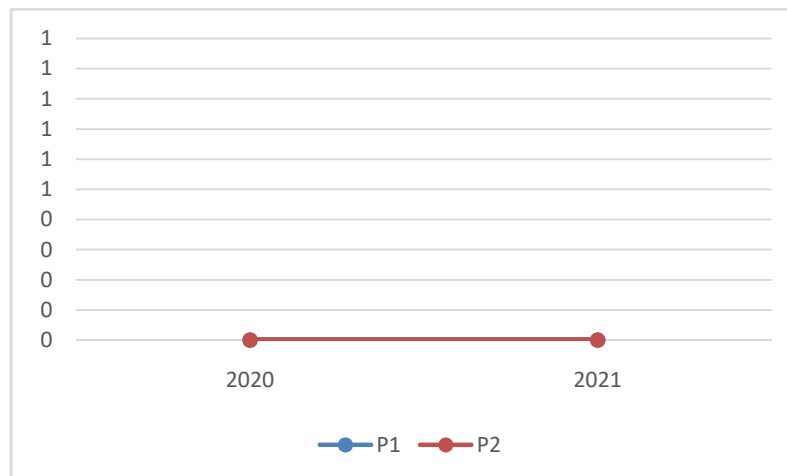
Perbandingan realisasi PNBP TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2021 dan 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
<b>Total Pendapatan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Perkembangan pendapatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini, P1 merupakan pendapatan nomor urut 1 pada table 8 dan P2 untuk pendapatan urut 2 yakni:

**Grafik9Perkembangan PNBP Tahun 2021 dan 2020**



## B.2. Belanja

*Realisasi  
Belanja Negara  
:Rp  
2.379.833.635*

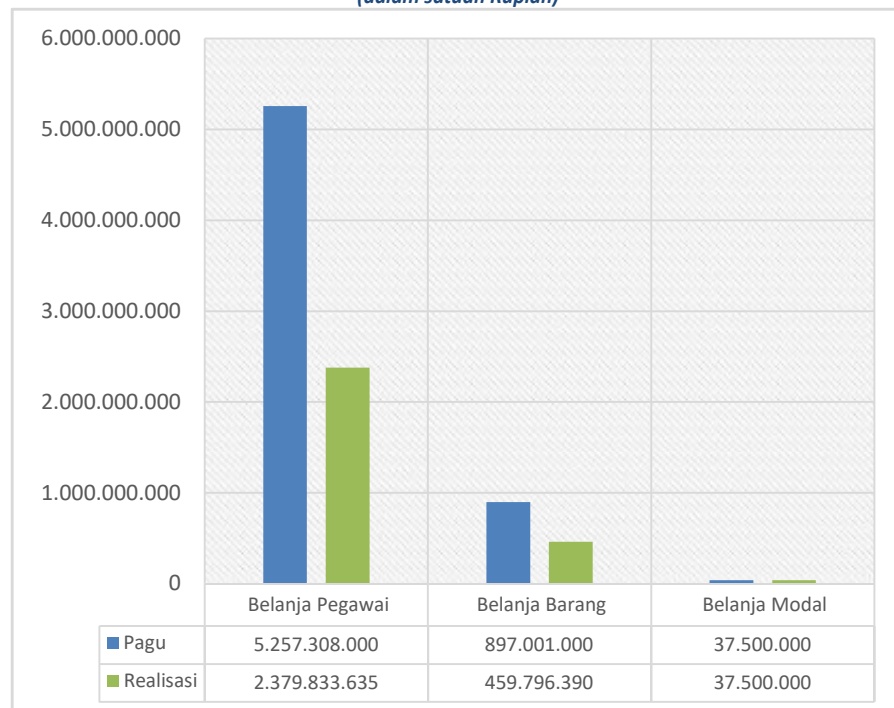
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Payakumbuh per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 2.379.833.635,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 46.00 persen dari anggaran senilai Rp 5.257.308.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2021  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.257.308.000	2.379.833.635	45
Belanja Barang	897.001.000	459.796.390	51
Belanja Modal	37.500.000	37.500.000	100
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>6.191.809.000</b>	<b>2.877.130.025</b>	<b>46</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>6.191.809.000</b>	<b>2.877.130.025</b>	<b>46</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik11Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2021  
(dalam satuan Rupiah)



Dibanding tahun 2020, realisasi belanja tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.724.644.643 atau sebesar 46 persen. mengalami Kenaikani ini disebabkan oleh:

1. Adanya realisasi belanja barang pada pemeliharaan gedung sudah tercapai 100 % pada semester 1
2. Realisasi Belanja Modal yang sudah terlaksana 100 % pada semester 1 tahun 2021.



Perbandingan realisasi belanja TA 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2021 dan 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	2.379.833.635	2.316.905.583	(2.877.474.365)	(45)
Belanja Barang	459.796.390	407.739.060	437.204.610	51
Belanja Modal	37.500.000	0	0	100
<b>Total Belanja</b>	<b>2.877.130.025</b>	<b>2.724.644.643</b>	<b>3.314.678.975</b>	<b>46</b>

### B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi  
Belanja  
Pegawai : Rp  
2.379.833.635*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Payakumbuh per 30 Juni 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp 2.379.833.635 dan Rp 2.316.905.583

Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 45 persen. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

1. Ada pegawai yang pensiun dan banyak pindah di Semester 1 tahun 2021 dibandingkan semester 1 tahun 2020.
2. Hakim dan beberapa pejabat sudah memperoleh THR tahun 2021 sedangkan di tahun 2020 semua pegawai mendapatkan THR 2020.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 13 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2021 dan TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	732.250.320	719.319.800	12.930.520	(54.94)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.073	10.008	65	(43.8)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	53.063.220	57.067.500	(4.004.280)	(50.64)
Belanja Tunj. Anak PNS	17.428.888	16.168.674	(1.260.214)	(53.06)
Belanja Tunj. Struktural PNS	20.800.000	18.200.000	(2.600.000)	(57.14)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.252.660.000	1.208.080.000	(44.580.000)	(44.04)
Belanja Tunj. PPh PNS	169.419.075	144.411.721	(25.007.354)	(32.89)

Belanja Tunj. Beras PNS	37.948.080	33.602.880	4.345.200	47.43
Belanja Uang Makan PNS	93.699.000	116.900.000	(23.201.000)	31.6
Belanja Tunjangan Umum PNS	2.555.000	3.145.000	(590.000)	17.67
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>2.379.833.656</b>	<b>2.316.905.583</b>	<b>62.928.073</b>	<b>(45.27)</b>
Pengembalian Belanja	(21)	(0)	21	(0)
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>2.379.833.635</b>	<b>2.316.905.583</b>	<b>(62.928.052)</b>	<b>(45.27)</b>

### B.2.2 BelanjaBarang

Realisasi  
Belanja Barang  
: Rp  
459.796.390

Realisasi Belanja Barang **Pengadilan Agama Payakumbuh** per 30 Juni 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp 459.796.390 dan Rp 407.739.060

Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami peningkatan sebesar 51.26 % dibanding tahun anggaran yang lalu. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Peningkatan belanja barang pada sub kelompok Pemeliharaan Gedung dan pemeliharaan Mesin

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 14 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2021 dan 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	220.001.000	218.694.000	1.307.000	45.74
Belanja Barang Non Operasional	4.800.000	0	4.800.000	96
Belanja Barang Persediaan	20.200.000	19.081.000	1.119.000	59.41
Belanja Jasa	57.627.867	67.665.222	(10.037.355)	40.72
Belanja Pemeliharaan	123.522.523	64.984.138	(58.538.385)	84.15
Belanja Perjalanan Dinas	33.645.000	37.314.700	3.669.700	37.92
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>459.796.390</b>	<b>407.739.060</b>	<b>(57.680.040)</b>	<b>51.26</b>
Pengembalian Belanja	(0)	(0)	0	(0)
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>459.796.390</b>	<b>407.739.060</b>	<b>57.680.040</b>	<b>51.26</b>

### B.2.3 Belanja Modal

*Realisasi  
Belanja  
Modal:Rp  
37.500.000*

Realisasi Belanja Modal **Pengadilan Agama Payakumbuh** per 30 Juni 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp 37.500.000 dan Rp 0.

Realisasi Belanja Modal TA 2021 mengalami peningkatan sebesar 100 persen dibanding tahun anggaran yang lalu. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Realisasi anggaran belanja modal sudah terealisasi pada semester 1 tahun 2021

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 15 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2021 dan 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	37.500.000	0	37.500.000	100.00
Total Belanja Brutto	37.500.000	0	37.500.000	100.00
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	37.500.000	0	37.500.000	100.00

#### B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Realisasi  
Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin:Rp  
37.500.000*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadilan Agama Payakumbuh per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 37.500.000 dan Rp 0. Tahun 2020 realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2020.

Rincian belanja modal peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2021 dan 2020  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	37.500.000	0	37.500.000	100
Total Belanja Brutto	37.500.000	0	37.500.000	100
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	37.500.000	0	37.500.000	100

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin semester 1 tahun 2021 adalah berupa :

1. Personal Computer Unit sebanyak 3 unit senilai Rp 37.500.000,-

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp  
32.411.000

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 32.411.000 dan Rp 973.000.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Payakumbuh per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 17 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	0	0
Persediaan	2.411.000	973.000
Persediaan yang Belum Diregister	0	0
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>161.476.265</b>	<b>973.000</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp 30.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 30.000.000 dan Rp 0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 18 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2021	31 Desember 2020
1.	Uang Tunai	33.619.100	0
2.	Bank	0	0
3.	Kwitansi	113.400.928	0
4.	Selisih *)	(28)	0
	Jumlah	147.020.000	0

\*) Selisih pencatatan karena tidak ada uang kecil

### C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

*Belanja  
Dibayar  
Dimuka  
(Prepaid):  
Rp0,00*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

### C.1.3. C.1.3. Persediaan

*Persediaan:Rp  
2.411.000*

Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 2.411.000 dan Rp 973.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Uraian	30 Juni 2021	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	2.096.000	973.000
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	315.000	0
	Total	2.411.000	973.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Kondisi dan nilai tersebut berdasarkan hasil opname fisik persediaan yang dilakukan tanggal 30 Juni

2021 yang tertuang dalam Berita Acara Stock Opname Persediaan nomor W3-A5/910.a /PL.03/6/2021 tanggal 30 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam data pendukung laporan keuangan ini.

#### C.1.4. C.1.4 Persediaan Yang Belum Diregister

*Persediaan yang belum diregister:*  
Rp 0

Persediaan yang belum diregister per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0,00. Persediaan yang belum diregister merupakan belanja persediaan yang belum dipertanggungjawabkan (belum diajukan penggantian uang persediaan).

*Aset Tetap : Rp*  
15.877.097.692

#### C.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp15.877.097.692 dan Rp 16.061.308.576 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 20 Rincian Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan
1	Tanah	5.984.628.000	5.984.628.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.350.216.641	2.312.716.641	37.500.000
3	Gedung dan Bangunan	10.635.390.900	10.635.390.900	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	15.827.968	15.827.968	0
	Jumlah	18.986.063.509	18.948.563.509	37.500.000
	Akumulasi Penyusutan	(3.108.965.817)	(2.887.254.933)	(221.710.884)
	Nilai Buku Aset Tetap	15.877.097.692	16.061.308.576	(184.210.884)

### C.2.1. Tanah

Tanah:Rp  
5.984.628.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 tidak ada perbedaan, yaitu sebesar Rp 5.984.628.000. Dalam tahun 2021 ini tidak ada mutasi aset tanah.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 21 Rincian Saldo Tanah

No.	No. Sertifikat	Lokasi	Atas Nama	Peruntukan	Luas (m <sup>2</sup> )	Jumlah
1.	789/2003	Jl. Soekarno Hatta No.214	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	Gedung Kantor	973	0
2.	790/2003	Jl. Soekarno Hatta No.214	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	Gedung Kantor	750	0
3.	1109/1991	Jl. Soekarno Hatta No.214	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	Gedung Kantor	599	0
		Jl. Soekarno Hatta No.214	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	Gedung Kantor	2.322	5.805.000.000
4.	827/20171	Jl. Soekarno Hatta No.214	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	Gedung Kantor	87	179.628.000
<b>Jumlah</b>					<b>2.409</b>	<b>5.984.628.000</b>

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan  
Mesin : Rp  
2.350.216.641

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.350.216.641 dan Rp 2.312.716.641

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	2.312.716.641
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	37.500.000
<b>Saldo per 30 Juni 2021</b>	<b>2.350.216.641</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	(2.070.352.265)
<b>Nilai Buku 30 Juni 2021</b>	<b>279.864.376</b>



Pembelian peralatan dan mesin per 30 Juni 2021 di Pengadilan Agama Payakumbuh terdiri dari :

1. 3 (tiga) buah P.C Unit, senilai Rp 37.500.000,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp  
10.635.390.900*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 tidak ada perbedaan, yaitu sebesar 10.635.390.900 Rp 10.635.390.900

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	10.635.390.900
[Tidak ada mutasi tambah kurang]	0
Saldo per 30 Juni 2021	10.635.390.900
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	(1.038.613.552)
Nilai Buku 30 Juni 2021	9.596.777.348

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,  
Irigasi, dan  
Jaringan: Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama, yaitu sebesar Rp 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	0
[Tidak ada mutasi tambah kurang]	0
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0

Nilai Buku 30 Juni 2021	0
-------------------------	---

Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang ada di PA Payakumbuh hanya terdiri dari irigasi.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp  
15.827.968*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama, yaitu sebesar Rp 15.827.968

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	15.827.968
[Tidak ada mutasi tambah kurang]	0
Saldo per 30 Juni 2021	15.827.968
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	15.827.968

### C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap: Rp  
(15.877.097.692)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp (3.108.965.817) dan Rp (2.877.254.933).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.350.216.641	2.070.352.265	279.864.376
2	Gedung dan Bangunan	10.635.390.900	1.038.613.552	9.596.777.348
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	15.827.968	0	15.827.968
Jumlah		13.001.435.509	3.108.965.817	9.892.469.692

### C.3. Aset Lainnya

Aset  
Lainnya: Rp  
0

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, Aset Lainnya per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0

Tabel 23 Rincian Aset Lainnya per 30 Juni 2021  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud	0
Aset Lain-lain	7.485.000
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(7.485.000)
Jumlah Total	0

#### C.3.1. Aset Tak berwujud

Aset Tak  
Berwujud :  
Rp 0

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 tidak ada perubahan, yaitu sebesar Rp 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat

diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Aset tak Berwujud  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
<b>Software Komputer</b>		
1.	Domain Website <i>pta-padang.go.id</i>	0
2.	Aplikasi Pustaka	0
3.	Anti virus	0
<b>Jumlah Total</b>		<b>0</b>

Mutasi nilai aset tak berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	0
[Tidak ada mutasi tambah kurang]	0
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Amortisasi s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

### C.3.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :  
Rp 7.485.000

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama, yaitu sebesar Rp 7.485.000. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Tinggi Agama Padang serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tidak ada mutasi nilai aset lain-lain per 30 Juni 2021 selain penambahan penyusutan:

Saldo per 31 Desember 2020	7.485.000
[Tidak ada mutasi tambah kurang]	0
Saldo per 30 Juni 2021	7.485.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	(7.485.000)
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

### C.3.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya :  
Rp 7.485.000*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 7.485.000 dan Rp 7.485.000. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 25 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Aset lain-lain	Nilai Perolehan	Akumulasi penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1.	Aset tak berwujud	0	0	0
2.	Aset lain-lain	7.485.000	7.485.000	0
Jumlah Total		7.485.000	7.485.000	0

### C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban  
Jangka Pendek :  
Rp 30.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 30.000.000 dan Rp 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada **Pengadilan Agama Payakumbuh** per 30 Juni 2021 disajikan pada tabel di bawah :

**Tabel 26 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Utang Kepada Pihak Ketiga	0	17.614.422
Uang Muka dari KPPN	147.020.000	0
Jumlah	147.020.000	17.614.422

#### C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada  
Pihak Ketiga:  
Rp 0,00*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 35.294.796. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus

segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga **Pengadilan Agama Payakumbuh** per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1.	Telepon	0	135.703
2.	Fax	0	278.202
3.	Listrik	0	6.859.131
4.	Air bulan Desember	0	354.360
5.	Air bulan November	0	413.400
6.	Astinet	0	13.000.000
7.	Web Domain	0	55.000
8.	Uang Makan	0	14.829.000
	Jumlah	0	35.924.796

#### C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp 30.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 30.000.000 dan Rp 0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

#### C.5. Ekuitas

Cadangan  
Piutang:  
Rp  
15.879.508.692

Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 15.879.508.692 dan Rp 16.026.356.780. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*PNBP :Rp 0* Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 28 Rincian PNBP 30 Juni TA 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik/ Turun (%)
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
Total Pendapatan		0	0	0

Tidak ada Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berasal dan pendapatan sewa rumah dinas.

### D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai  
: Rp  
2.365.004.635*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.365.004.635 dan Rp 2.297.462.458. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai dapat dilihat pada tabel di berikut:

Tabel 29 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2021 dan 2020  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	732.250.320	719.125.200	13.125.120	54.94
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.073	9.943	130	43.8



Beban Tunj. Suami/Istri PNS	53.063.220	57.048.040	(3.984.820)	50.64
Beban Tunj. Anak PNS	17.428.888	16.168.674	1.260.214	53.06
Beban Tunj. Struktural PNS	20.800.000	18.200.000	2.600.000	57.14
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.252.660.000	1.208.080.000	44.580.000	44.04
Beban Tunj. PPh PNS	169.419.075	144.411.721	25.007.354	32.89
Beban Tunj. Beras PNS	37.948.080	33.602.880	4.345.200	47.43
Beban Uang Makan PNS	78.870.000	97.671.000	(18.801.000)	31.6
Beban Tunjangan Umum PNS	2.555.000	3.145.000	(590.000)	17.67
<b>Total Beban Pegawai</b>	<b>2.365.004.635</b>	<b>2.297.462.458</b>	<b>67.542.177</b>	<b>2.94</b>

### D.3. Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan : Rp  
12.672.000*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 12.672.000 dan Rp 14.686.250. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Penurunan beban persediaan disebabkan pembebanan dan penganggaran belanja barang persediaan belum maksimal dilaksanakan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 30 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2021 dan 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	12.672.000	14.686.250	(2.014.250)	(13.715)
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>12.672.000</b>	<b>14.686.250</b>	<b>(2.014.250)</b>	<b>(13.715)</b>

### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang  
dan Jasa : Rp  
261.333.071*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 261.333.071 dan Rp 265.644.104. Beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan beban ini disebabkan meningkatnya beban masing-masing akun terutama pada langganan listrik yang

memang adanya kenaikan harga tarif dasar listrik.

Rincian beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2021 dan 2020  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	183.534.000	183.224.000	310.000	46.31
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	412.000	397.000	15.000	41.2
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	16.500.000	19.750.000	(3.250.000)	34.81
Beban Barang Operasional Lainnya	6.500.000	400.000	6.100.000	80.45
Beban Barang Operasional Pandemi Covid-19	4.800.000	1.800.000	3.000.000	96
Beban Langganan Listrik	27.436.524	34.788.040	(7.351.516)	39.41
Beban Langganan Telepon	1.705.347	1.893.424	(188.077)	35.32
Beban Langganan Air	1.665.200	1.191.640	473.560	25.34
Beban Sewa	18.780.000	22.200.000	(3.420.000)	48.3
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>261.333.071</b>	<b>265.644.104</b>	<b>(4.311.033)</b>	<b>(1.623)</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:*  
Rp 129.612.523

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 129.612.523 dan Rp 67.763.138. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2021 dan 2020  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.749.000	27.956.000	39.793.000	100
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.773.523	37.028.138	18.745.385	70.57
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6.090.000	2.779.000	3.311.000	59.41
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>129.612.523</b>	<b>67.763.138</b>	<b>(61.849.385)</b>	<b>(91.273)</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan  
Dinas: Rp  
33.645.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 33.645.000 dan Rp 37.314.700. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 33 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2021 dan TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	33.645.000	37.314.700	(3.669.700)	(9.834)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0	
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>33.645.000</b>	<b>37.314.700</b>	<b>(3.669.700)</b>	<b>(9.834)</b>

## D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi : Rp  
221.710.884*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 221.710.884 dan Rp 227.402.314. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 34 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2021 dan 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	115.223.594	120.915.024	(5.691.430)	(2.503)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	106.487.290	106.487.290	0	0,0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0,00
Beban Amortisasi Software	0	0	0	0,00
<b>Total Beban Penyusutan</b>	<b>221.710.884</b>	<b>227.402.314</b>	<b>(5.691.430)</b>	<b>(2.503)</b>

## D.8. Kegiatan Non Operasional

*Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional :  
Rp0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 35 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2021 dan 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
<b>Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
<b>Surplus dari kegiatan non operasional lainnya</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>9.000</b>
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	(119.000)	(119.000)
Beban dari kegiatan non operasional	0	0	(0)
<b>Total Surplus/ (Defisit) dari kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>(210.000)</b>	<b>(210.000)</b>

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya bersumber dari Pendapatan penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp0. Sedangkan bebannya bersumber dari Beban penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp 0

Pendapatan/ beban penyesuaian nilai persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO).

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :* Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp  
*Rp*  
**16.026.356.780** 16.026.356.780 dan Rp 16.454.017.464

### E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit)* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah  
*LO : Rp*  
**(3.023.978.113)** sebesar Rp(3.023.978.113) dan Rp(2.910.173.964). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Dampak Kumulatif Perubahan

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas:* Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tahun 2020 ini koreksi yang terjadi pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh berupa Koreksi Atas Reklasifikasi, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Lain-lain.  
*Rp.0*

### E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar Entitas : Rp*  
**2.877.130.025** Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.877.130.025 dan Rp 2.724.644.643.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 36 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2021  
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(0)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.877.130.025
<b>Jumlah</b>	<b>2.877.130.025</b>

#### E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2021, DDEL sebesar Rp 0 sedangkan DKEL sebesar Rp 2.877.130.025

#### E.5. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir*  
:Rp  
15.879.508.692

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 15.879.508.692 dan Rp16.268.488.143

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK pada Laporan Keuangan periode berjalan maupun atas laporan keuangan tahun yang lalu.

#### F.2.2. Rekening Pemerintah

Terdapat 1 rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Payakumbuh dengan kode BA.ES1 005.01 (Badan Urusan Administrasi), yaitu : rekening VA nomor 65324020501000 atas nama BPG 011 PA PAYAKUMBUH 01 Pengadilan Agama Payakumbuh pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 0,00. Rekening ini sudah memperoleh izin pembukaan dari KPPN Pusat dengan nomor 2732/ WPB.12/ KP.06/ 2020 tanggal 16 Oktober 2020.

#### F.2.3. Revisi DIPA

**Pengadilan Agama Payakumbuh** Tidak ada Revisi DIPA pada semester 1 th 2021

#### F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

**Pengadilan Agama Payakumbuh** ada melakukan ralat SPM dalam semester I 2021.

Tabel 37 Daftar Ralat SPM, SSBP dan SSPB

No	Satker	Keterangan
1	PA PAYAKUMBUH	Terjadi Kesalahan akun pencairan dana pada Surat Perintah Membayar (SPM) yang kami terbitkan nomor : 0042T/402050/2021 tanggal 29 April 2021 dan telah diterbitkan SP2D nomor : 210111301007131 tanggal 29 April 2021 Nilai SP2D Rp 29.969.369,- Semula Akun 402050.011.523121.00501.WA.1066EAA.A000.000001.00000.2.0856.2.000000.000000 Nilai Rp. 9.789.400,- seharusnya Akun 402050.011.523111.00501.WA.1066EAA.A000.000001.00000.2.0856.2.000000.000000 Nilai Rp. 860.000,- dan 402050.011.521811.005101.1066994.A000.000001.00000.2.0856.2.000000.000000 Nilai Rp. 12.800.000,-

<i>No</i>	<i>Satker</i>	<i>Keterangan</i>
-		-

**F.2.5. Catatan Penting Lainnya**

Tidak ada catatan yang perlu dicantumkan dalam pos ini.